



Gubernur Diminta Kejar Persoalan Predikat WDP



H Subhan Nur

SUBHAN: JANGAN HANYA PENCITRAAN

PONTIANAK-RK. Ganjaran predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dikatakan suatu bukti ada yang kurang beres terhadap kinerja. Di samping harus menjadi bahan pembelajaran, Pemprov Kalbar diminta untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut.

Bahkan tidak kalah pentingnya, menurut H. Subhan Nur, Anggota DPRD Kalbar agar Pemprov Kalbar ditegaskan untuk tidak hanya mengumbar capaian-capaian saja tanpa adanya kekurangan seperti kerap disampaikan di setiap kesempatan. "Maka dari itu, jangan hanya bicara pencitraan di media saja seperti yang dilakukan sejauh ini," ujarnya, Jumat (5/7).

Pantauan yang dilakukan Politisi Partai Nasdem ini menyatakan,

sejauh ini Pemprov Kalbar hanya menyampaikan keberhasilan-keberhasilan di banyak aspek. Sedangkan apa yang belum tercapai seolah tidak mau diumbar ke khalayak. Padahal menurut Subhan itu bisa menjadi bahan evaluasi. "Jangan kita hanya main klaim, ini lembaga resmi negara yang ngomong perolehan WDP" cetusnya.

Menurutnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji yang memiliki banyak

pengalaman lantaran pernah menjabat Wakil Wali Kota Pontianak dan dua periode sebagai Wali Kota Pontianak bahkan kerap memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), seharusnya tahu dan paham apa saja indikator penilaian tersebut dan berharap tahun depan dan seterusnya persoalan semacam ini tidak kembali terulang. "Itu sebagai bahan evaluasi gubernur," tegasnya.

Atas perolehan WDP ini, Sub-

han menyarankan agar Gubernur Kalbar mengejar titik persoalan sebenarnya serta memperbaikinya. Apakah itu soal kinerja, anggaran atau apapun yang berkaitan predikat yang disandang dari BPK. "Ada aspek penggunaan anggaran yang kurang. Itu tidak bisa dihindari. Karena ini WDP kan pasti ada indikatornya," tutup Subhan.

Reporter: Gusnadi
Redaktur: Andry Soe